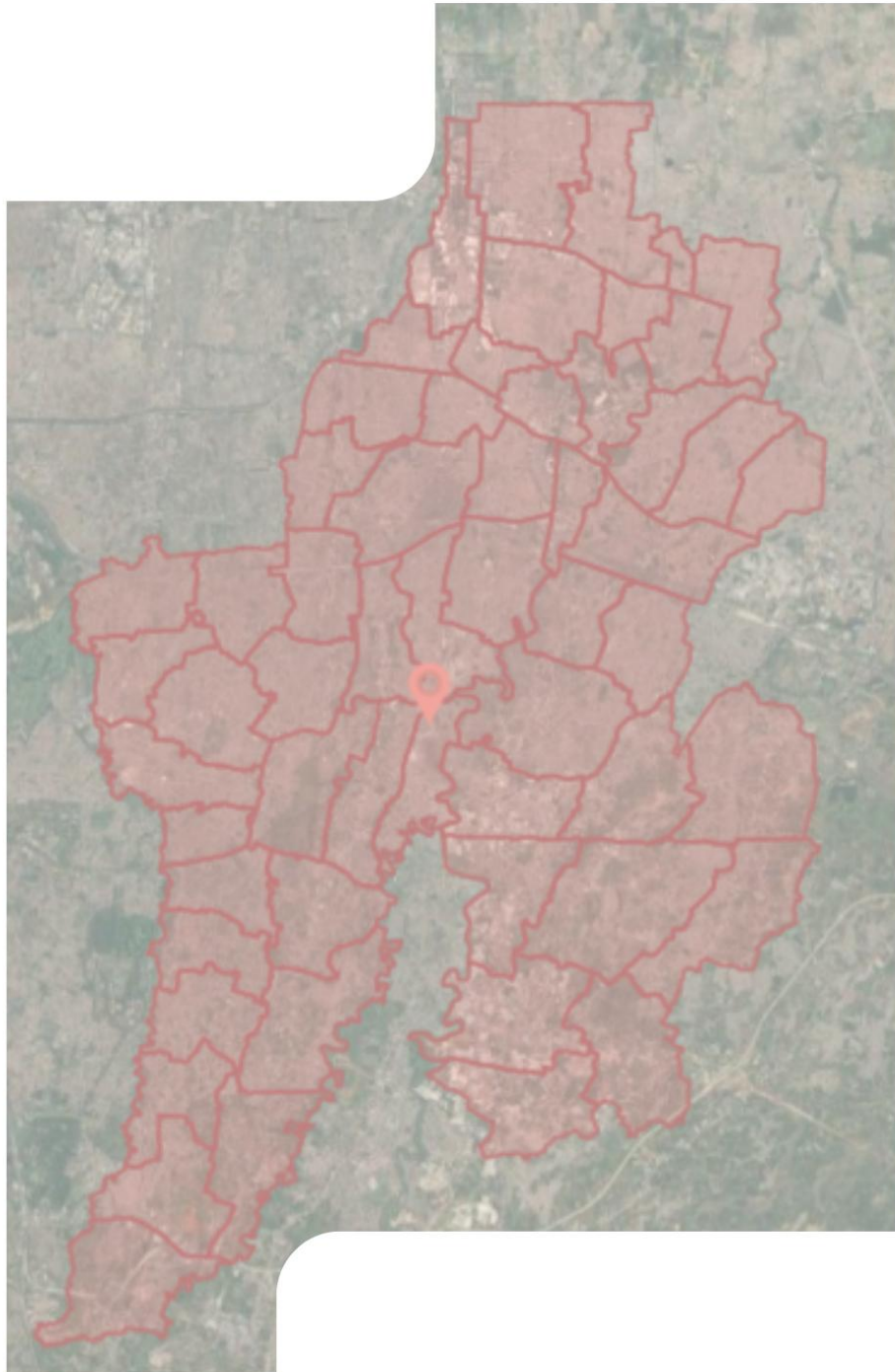




DINAS TATA RUANG
ADAPTIF • KOLABORATIF • TANGGUH



**RANCANGAN AKHIR
RANCANGAN STRATEGIS
TAHUN 2025-2029**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	9
2.1 GAMBARAN PELAYANAN	9
2.1.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR DINAS TATA RUANG	9
2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	16
2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	23
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN	36
3.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS TATA RUANG	36
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	41
3.2.1 STRATEGI PERANGKAT DAERAH	43
3.2.2 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	47
4.2 TARGET KINERJA	89
4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	89
4.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	91
BAB V PENUTUP	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kota Bekasi memegang peran strategis sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabekpunjur, berfungsi sebagai simpul mobilitas, motor penggerak ekonomi, dan pusat urbanisasi. Dalam konteks penataan ruang, Kota Bekasi memiliki tanggung jawab untuk mendukung keberlanjutan kawasan melalui pengelolaan tata ruang yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Berdasarkan dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, penataan ruang menjadi elemen kunci untuk mendukung visi "Kota Bekasi Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Ihsan" yang sejalan dengan RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 serta cita-cita Indonesia Emas 2025-2045.

Penataan ruang di Kota Bekasi dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti pertumbuhan penduduk yang pesat, kebutuhan infrastruktur yang meningkat, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Data dari dokumen menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk memengaruhi kebutuhan sarana dan prasarana publik, seperti air bersih, pengelolaan limbah, dan fasilitas permukiman. Selain itu, Indeks Penataan Ruang Kota Bekasi Tahun 2020-2024 mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan penataan ruang di Kota Bekasi bertujuan untuk menciptakan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sebagaimana diuraikan pada aspek daya saing daerah. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur publik, peningkatan aksesibilitas melalui sistem perhubungan, serta pengelolaan permukiman dan perumahan yang layak huni. Penataan ruang juga harus selaras dengan regulasi dan tata kelola yang berintegritas untuk memastikan harmonisasi antara pembangunan fisik dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2025-2029, berpedoman pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dokumen ini juga selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029 dan RPJMD Kota Bekasi 2025-2029, dengan fokus pada penguatan pondasi pembangunan melalui optimalisasi penataan ruang kota. Pendekatan teknokratik, seperti manajemen strategik dan sistem dinamik, diterapkan untuk memastikan penataan ruang yang rasional, operasional dan akuntabel.

Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan keberlanjutan lingkungan, sekaligus menjawab tantangan urbanisasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar Hukum penyusunan RENCANA STRATEGIS DINAS TATA RUANG TAHUN 2025-2029 antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

- Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor xx, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor xx);
 26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
 27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
 28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
 29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
 30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 123 Seri D)
32. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagai pedoman perencanaan pembangunan dalam bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi penyelenggaraan penataan ruang Kota Bekasi dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029;
2. Mengoperasionalkan visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang diamanatkan kepada Dinas Tata Ruang dalam RPJMD Kota Bekasi 2025-2029;
3. Menjamin keselarasan Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dengan RJPMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, dan RPJMN Tahun 2025-2029;
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi setiap tahun hingga tahun 2030.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab berisi rumusan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang, identifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang tahun 2025-2029, uraian maksud dan tujuan, serta penjelasan sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab berisi penjelasan terkait gambaran umum pelayanan Dinas Tata Ruang meliputi kinerja keuangan di periode sebelumnya serta gambaran proyeksi 5 tahun kedepan, penjabaran tugas, fungsi, struktur Dinas Tata Ruang, serta penjabaran identifikasi permasalahan dan isu strategis yang dihadapi selama 5 tahun kedepan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab berisi penjabaran tujuan dan sasaran yang merupakan gambaran perpanjangan dari ketercapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi. Serta penjabaran Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tata Ruang selama 5 tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tata Ruang Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab berisi keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Tata Ruang selama 5 tahun kedepan, parameter kinerja yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab berisi kesimpulan penting substansial, kediah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Renstra Dinas Tata Ruang 2025-2029

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN

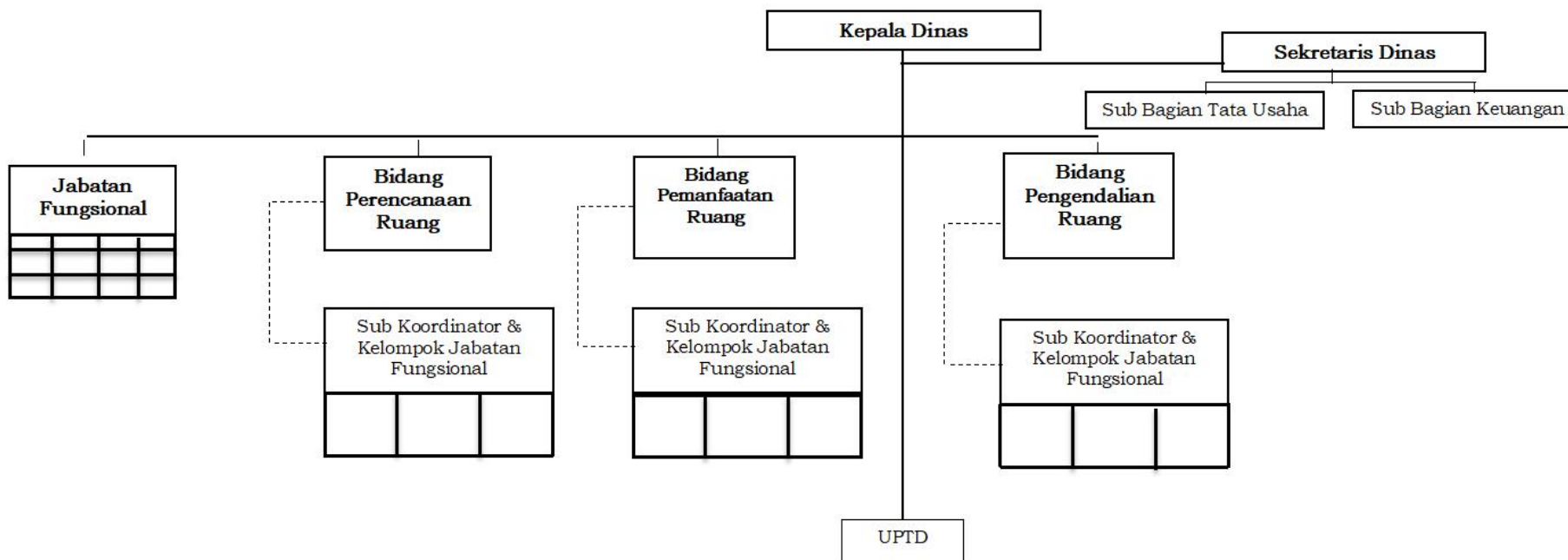
2.1.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR DINAS TATA RUANG

Kedudukan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 adalah sebagai unsur pembantu Wali Kota Bekasi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang.

Struktur organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - i. Sub Bagian Tata Usaha;
 - ii. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Ruang;
4. Bidang Pemanfaatan Ruang;
5. Bidang Pengendalian Ruang;
6. UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

GAMBAR 2.1
 STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI



Dinas Tata Ruang Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam koordinasi kebijakan pelayanan di bidang Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Ruang, Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Bangunan. Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok:

Membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang Perencanaan Ruang, Penataan Ruang dan Pengendalian Ruang untuk mencapai Visi dan Misi Dinas.

Fungsi:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di Bidang Tata Kota serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan PD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
7. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

9. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

2. Sekretariat

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik dan Perencanaan, Kepegawaian, serta Keuangan

Fungsi:

1. Pengkoordinasian, penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
2. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
3. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
4. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
5. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
6. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
7. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
8. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
9. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala.
10. Pelaksanaan tugas kegiatan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;

3. Bidang Perencanaan Ruang

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan teknis, pemetaan dan pengukuran serta pengolahan data dan penanganan sistem informasi teknologi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya

Fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis, serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengolahan, penyiapan, penyusunan dan pengembangan dalam pelaksanaan perencanaan teknis yang meliputi infrastruktur dan arsitektur kota;
4. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengolahan, penyiapan, analisa dan penyusunan serta advis teknis dalam pelaksanaan penatagunaan lahan dalam pelayanan pemanfaatan ruang;
5. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengolahan, analisa, penyiapan dan penyusunan dalam pelaksanaan analisa dan pengukuran lahan;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

4. Bidang Pemanfaatan Ruang

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemanfaatan bangunan, pengelolaan prasarana dan sarana serta fasilitasi sengketa tata ruang untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Perumusan bahan kebijakan perencanaan, pengolahan, analisa, penyiapan, dan penyusunan kajian advis teknis dalam pelaksanaan penataan bangunan yang meliputi tata bangunan dalam pelayanan pemanfaatan ruang;
4. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, survei, pengukuran, pemetaan, pengelolaan, pemeriksaan, penelitian, penilaian, penyusunan dan pengembangan serta pemberian advis teknis dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana;
5. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisa, fasilitasi, penyiapan dan penyusunan dalam pelaksanaan penelitian bangunan;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

5. Bidang Pengendalian Ruang

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas yang meliputi penatagunaan lahan, penataan bangunan sertafasilitasi insentif disinsentif dan pembongkaran bnagunan untukmencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;

3. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengolahan, penelitian, penilaian, pemanfaatan, pengesahan, pelayanan, pengembangan dan penyusunan serta penyuluhan dalam pelaksanaan penatagunaan lahan;
4. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penataan, pengarahannya, pengembangan, penyusunan, sosialisasi dan penelitian dalam pelaksanaan penataan bangunan;
5. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisa, penanganan, pengendalian, fasilitasi dan penyusunan dalam pelaksanaan pengendalian prasarana bangunan;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

Pasal 11

Di lingkungan Dinas Tata Ruang dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang

keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja;

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Sub-Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing;

(3) sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu Kelompok Substansi;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian tugas Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota

2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Kondisi Umum Pegawai

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Tata Ruang seperti diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi didukung oleh SDM dengan komposisi data sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
Tahun 2025

No	Status Pegawai	Jumlah (Orang)	%
1.	PNS	79	47
2.	PPPK	83	52.4
3.	TENAGA KERJA KONTRAK	1	0.6
	Jumlah	163	100,00

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Mei 2025

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Jenis Kelamin	ASN				PPPK	TKK	Total
		Golongan						
		I	II	III	IV			
1	L	-	8	42	7	61	1	119
2	P	-	1	19	2	22	-	44
	Total	-	9	61	9	83	1	163

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Mei 2025

Dari Total Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, berikut Klasifikasi Sumber Daya Manusia menurut Tingkat Pendidikan:

Tabel 2.3. Data Pendidikan Pegawai Dinas Tata Ruang
Kota Bekasi Tahun 2025

NO	Pendidikan	Jumlah (Orang)	
		L	P
1.	Strata-3 (S3)	-	-

2.	Strata-2 (S2)	11	3
3.	Strata-1 (S1)	47	17
4.	Strata-1 (S1) Planologi	5	4
5.	Strata-1 (S1) Teknik Sipil	5	11
6.	Strata-1 (S1) Arsitektur	4	2
7.	Sarjana Muda/ D3	5	4
8.	SLTA/SMA	51	6
9.	SLTP	-	-
10.	SD	-	-
	Jumlah	119	44

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Mei 2025

Tabel 2.4. Sumber Daya Pegawai Dinas Tata Ruang
Kota Bekasi Tahun 2025

No	Bidang	Status Pegawai			Golongan			
		PNS	PPPK	TKK	IV	III	II	I
1	Sekretariat	9	20	-	3	6	-	-
2	Perencanaan Ruang	11	14	-	2	8	1	-
3	Pemanfaatan Ruang	11	18	1	2	9	-	-
4	Pengendalian Ruang	21	15	-	1	17	3	-
5	UPTD Wasbang Wil I	4	3	-	-	4	-	-
6	UPTD Wasbang Wil II	6	2	-	-	4	2	-
7	UPTD Wasbang Wil III	3	2	-	-	3	-	-

8	UPTD Wasbang Wil IV	6	3	-	1	5	-	-
9	UPTD Wasbang Wil V	4	3	-	-	2	2	-
10	UPTD Wasbang Wil VI	4	3	-	-	-	1	-
	Jumlah	79	83	1	8	54	7	-

2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tergolong belum memadai terangkum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Sarana Kerja Dinas Tata Ruang

No	Uraian	Banyaknya	Satuan	Kondisi (Baik/Rusak/Rusak Berat)			Keterangan
				B	R	RB	
1	Gedung	1	Unit (1Lantai)/M2	1			1 lantai di Gedung 10 Lantai Kantor Wali Kota Bekasi
2	Area Parkir	1	Area	1			Parkir Bersama Gedung 10 Lantai Kantor Wali Kota Bekasi
3	AC Sentral	1		1			
4	Alat Pemadam Kebakaran	4					
5	Alat Rumah Tangga Lain-lain	11		6		4	
6	Alat Ukur Beton	1		1			

7	Audio Amplifier	1		1			
8	Bangku Tunggu	2		2			
9	Camera Video	3		1		2	
9	Dispenser	5		2		3	
11	Filling Cabinet Besi	5		5			
12	Global Positioning System	8		1		7	
13	H.T.	5		5			
14	Handy Cam	1		1			
15	Karpet	1		1			
16	Kursi Biasa	7		5		2	
17	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20		20			
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1		1			
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3		3		1	
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4		4			
21	Kursi Tamu	1				1	
22	Lemari Besi	6		6			
23	Lemari Es	1		1			

24	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20		20			
25	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1		1			
26	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3		3			
27	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4		4			
28	Mesin Absensi	2				2	
29	Mesin Penghisap Debu	1				1	
30	Mesin Potong Rumput	1				1	
31	Microphone Table Stand	1				1	
32	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	4		4			
33	Monitor	11		6		5	
34	Note Book	1				1	
35	P.C Unit	60		50	10		
36	P.C. Workstation	6		6			
37	Peralatan Personal Komputer	7				7	

	Lainnya						
38	Pick Up	7		7			
39	Printer	41		31		10	
40	Proyektor	8		2		6	
41	Scanner	5		1		4	
42	Sepeda Motor	21		5	16		
43	Server	9		9			
44	Laptop	8		5	3		
45	Layar Projector	1		1			
46	Sofa	1				1	
47	Sound System	2		2			
48	Televisi	3		1		2	
49	Tustel	3				3	
50	Unintemuptible Power Supply (UPS)	5		5			
51	White Board	3				3	

Sumber : Data Aset Dinas Tata Ruang, Desember 2024

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai Dinas memiliki tugas dan fungsi pada urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi sebagai berikut:

1. Pengaturan Penataan Ruang;

Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Pengaturan penataan ruang diselenggarakan untuk :

- a. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang
- b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan
- c. Mewujudkan keadilan bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang

2. Pembinaan Penataan Ruang;

Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pembinaan Penataan Ruang diselenggarakan melalui:

- a. Peningkatan kualitas dan efektifitas Penyelenggaraan Penataan Ruang
- b. Peningkatan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang

3. Pengawasan Penataan Ruang;

Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk :

- a. Menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang

- b. Menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang
- c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2024 yang telah disepakati. Selain itu kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang juga diukur dengan indikator bidang urusan Penataan Ruang yang diatur dalam Permendagri no. 86 Tahun 2017, adapun indikator Penataan Ruang sebagai berikut:

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2020-2024

NO	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4		5	6				9	10				11	12			
1	Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan perkotaan				18.7 6%	18.8 8%	19.0 0%	19.12 %	19.73 %	18.76 %	19.61 %	19.83 %	44.3 %	44.8 7%	100 %	103 %	103%	231. 6%	227. 4%

NO	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang				-	-	-	-	77%	-	-	-	-	77%	-	-	-	-	100 %
3	Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang				-	-	-	-	77%	-	-	-	-	77%	-	-	-	-	100 %

NO	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase Penilaian Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang				-	-	-	-	67%	-	-	-	-	67%	-	-	-	-	100 %

Sumber Data : Lakip Distaru Tahun 2024

Tabel ini menjelaskan Perhitungan capaian sasaran Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang dapat didefinisikan operasional Nomenklatur Indikator Kinerja

- a. Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang :
Persentase yang dihitung dari jumlah persentase dari realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pengaturan dan pembinaan penataan ruang dibagi dengan total persentase target capaian output sub kegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang kemudian dikalikan dengan target penilaian persentase. Target penilaian persentase tersebut berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86 Tahun 2017
- b. Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang : Persentase yang dihitung dari jumlah persentase dari realisasi capaian output subkegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang dibagi dengan total persentase target capaian output sub kegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang kemudian dikalikan dengan target penilaian persentase. Target penilaian persentase tersebut berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86 Tahun 2017
- c. Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang :Persentase yang dihitung dari jumlah persentase dari realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawsan tata ruang dibagi dengan total persentase target capaian output sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengaawasan tata ruang kemudian dikalikan dengan target penilaian persentase. Target penialian persentase tersebut berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86 Tahun 2017

Dalam pelaksanaan realisasi anggaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

KOMPONEN	2020	2021	2022	2023	2024	RATA-RATA
Pagu Anggaran	6.983	26.178	25.988	26.029	26.145	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	4.9670	16.732	17.435	18.223	18.721	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.893.	9.446	7.710	6.490	6.181	
Program Penataan Bangunan Gedung	-		842	1.315	1.241	
Realisasi Anggaran	6.161	23.283.	25.550	22.893	23.296	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	4.892	15.677	16.419	16.004	16.859	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.158	7,920	6.442	5.692	5.264	
Program Penataan Bangunan Gedung			688	1.196	1.172	

2.1.4 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah masyarakat Kota Bekasi demi mewujudkan penataan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dinas Tata Ruang bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui layanan Rumah Tinggal Tunggal, Keterangan Rencana Kota (KRK), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Rekomendasi Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Rencana Tapak / Siteplan, Pengesahan Berita Acara Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sesuai regulasi. Selain itu, Dinas Tata Ruang juga berfokus pada pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan kepatuhan terhadap RTRW, penanganan pengaduan pelanggaran tata ruang. Pelayanan ini didukung oleh penyediaan informasi tata ruang yang transparan, pelibatan masyarakat dalam perencanaan, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan kawasan strategis di Kota Bekasi.

Kelompok Sasaran Faktor Eksternal untuk mendukung kinerja layanan Dinas Tata Ruang antara lain : DPMPTSP, BPKAD, Disperkimtan, BPN Kota Bekasi, ASPI (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia), IAP (Ikatan Ahli Perencanaan) , Tokoh Masyarakat (Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang) .

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi realita yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya. Rumusan permasalahan didasarkan pada analisis deskriptif dan diagnosis. Rumusan permasalahan pelayanan dan Isu Strategis Dinas Tata Ruang disajikan pada Tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.8 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Dinas Tata Ruang

PERMASALAHAN PD (DINAS TATA RUANG)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perlu Regulasi Bidang Penataan Ruang	Global Warming dan Urbanisasi	1. Adanya Proyek Strategis Nasional 2. Adanya Perubahan Regulasi tingkat nasional	1. Perubahan Regulasi tingkat Provinsi	Belum Optimalnya Kinerja Pengaturan Tata Ruang
Belum tersedianya Regulasi pengembangan kawasan berorientasi transit			2. Dinamika Politik	
Perlu dilakukan peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang serta Pemutakhiran Peta Dasar untuk Rencana Tata Ruang				
Perlunya Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang berbasis Teknologi Informasi			Keterbukaan Informasi Tata Ruang	Belum Optimalnya Kinerja Pembinaan Penataan Ruang

PERMASALAHAN PD (DINAS TATA RUANG)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Perlunya Sosialisasi Produk Tata Ruang kepada Masyarakat			Keterbukaan Informasi Tata Ruang	
Perlunya Peningkatan SDM Bidang Penataan Ruang			SDM yang Kompeten pada Lingkungan Kerja Dinas	
KONFLIK LAHAN				
Perlunya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau		Kebijakan Nasional untuk pemenuhan RTH 30%	Alokasi Anggaran Pembebasan Tanah untuk RTH	Belum Optimalnya Kinerja Pelaksanaan Tata Ruang (Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)
Perlu dilakukan peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang serta Pemutakhiran Peta Dasar untuk Rencana Tata Ruang		1. Adanya Proyek Strategis Nasional 2. Adanya Perubahan Regulasi tingkat nasional	1. Perubahan Regulasi tingkat Provinsi 2. Dinamika Politik	
Perlunya Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				

PERMASALAHAN PD (DINAS TATA RUANG)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Belum Terlaksananya Penilaian Pelaksanaan KKPR				
Ketersediaan lahan terbatas		Peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang tidak diikuti dengan pembangunan infrastruktur transportasi publik perkotaan	Mobilitas penduduk yang tinggi di Kota Bekasi	
Belum terlaksananya Pemberian Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang				
Belum Optimalnya Penyerahan PSU Perumahan di Kota Bekasi		Belum tegasnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran Penyelenggaraan PSU.	Belum optimalnya peran Tim Verifikasi PSU dalam pengawasan pengendalian penyediaan dan atau penyerahan PSU	
Banyaknya Pemohon PBG yang tidak bersedia untuk mengurus permohonan SLF bangunan gedung				

PERMASALAHAN PD (DINAS TATA RUANG)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Belum terlaksananya penerbitan SLF pada Bangunan Gedung Pemerintah dikarenakan Instansi Pengelola Bangunan tidak memiliki anggaran untuk penyusunan kajian kelayakan fungsinya		Kewajiban kepemilikan SLF pada seluruh Bangunan Gedung	Belum terlaksananya Instruksi Walikota terkait Penerbitan SLF Bangunan Pemerintah	
Belum optimalnya penyelesaian Sengketa penataan ruang				
Belum terlaksananya evaluasi nilai retribusi prasarana secara berkala Mencakup penyesuaian satuan reklame yang akan dihitung berdasarkan tarif retribusi				
Belum tersusunnya peraturan yang bersifat operasional mengenai Bangunan Gedung Hijau di Kota Bekasi				
Belum terlaksananya penerbitan SBKBG sebagai tindak lanjut PBG				

PERMASALAHAN PD (DINAS TATA RUANG)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Belum terlaksananya Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang terhadap bangunan-bangunan fungsi usaha yang telah memiliki izin (yang telah/belum memiliki izin)			Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengendalian, belum tersedia data tekstual dan spasial perwujudan RTR	
Belum tertibnya Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya lahan terbangun karena peningkatan jumlah penduduk	ANCAMAN BANJIR YANG MASIH POTENSI BESAR	PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN KETIDAKPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG YANG BELUM OPTIMAL	Belum Optimalnya Kinerja Pengawasan Tata Ruang
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang pada Daerah Aliran Sungai/ Sempadan Sungai/ bantaran sungai			Belum maksimalnya penanganan Banjir secara komprehensif (kendala pengadaan lahan, buruknya sistem drainase perkotaan, sampah dll)	
Belum terlaksananya penilaian pengawasan pemenuhan standar teknis kawasan terhadap kawasan permukiman yang sedang/ telah terbangun				

Sumber: Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS TATA RUANG

Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah agar sejalan dengan visi, misi, serta program prioritas kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi Dinas Tata Ruang dalam menyusun program dan kegiatan selama lima tahun ke depan, sekaligus memastikan arah pembangunan berjalan terintegrasi dan terarah.

Tujuan utama penyusunan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang adalah untuk menciptakan perencanaan yang sistematis, terukur, akuntabel yang menjamin keterpaduan program antar perangkat daerah, dan mendukung penyusunan RKPD tahunan, serta menjadi dasar evaluasi kinerja. Sasaran Renstra dirumuskan agar setiap program dan kegiatan Dinas Tata Ruang memiliki target yang jelas dan terukur. Fokus sasaran meliputi peningkatan kualitas penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, kepatuhan terhadap RTRW Kota Bekasi Tahun 2024 - 2044 dan RDTR Kota Bekasi Tahun 2015 - 2035, serta penyediaan ruang terbuka hijau. Sasaran ini juga selaras dengan target pembangunan di tingkat nasional dan provinsi seperti RPJMN Tahun 2025 - 2029, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029, serta mendukung Asta Cita dan Jabar Istimewa. Dengan pendekatan teknokratik dan manajemen strategik, logic model, berpikir sistem, dan sistem dinamik, dokumen Renstra ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan tata ruang Kota Bekasi secara inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Kemudian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Dinas Tata Ruang adalah Tujuan 1 “Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari” dan Sasaran 1.1 “Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern” Adapun tujuan dan sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang mendukung tujuan dan sasaran RPJMD dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

NSPK	SASARAN RPJMD Kota Bekasi 2025 - 2029	TUJUAN	SASARAN	INDIKTAOR (IKU RENSTRA)	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
PENGATURAN, PEMBINAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN (TURBINLAKWAS) PENATAAN RUANG	MENINGKATNYA ESTETIKA KOTA DISERTAI INFRASTRUKTUR MODERN	TERWUJUDNYA RUANG KOTA YANG AMAN, NYAMAN, DAN PRODUKTIF	MENINGKATNYA KETERPADUAN PEMANFAATAN RUANG	INDEKS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	N/A	45,12	45,25	45,38	45,51	45,64	45,77	
				INDEKS PENGATURAN, PEMBINAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG	75.82	81,13	81,26	81,39	81,52	81,65	81,80	Perubahan pada variabel outcome
				PERSENTASE PEMENUHAN RTH PUBLIK KOTA	8.97%	9,10%	9,23%	9,36%	9,49%	9,62%	9,74%	

Kemudian, definisi operasional dan rumus hitung indikator Tujuan, Sasaran (IKU Renstra) dan Indikator Outcome Dinas Tata Ruang, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Definsi Operasional Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Outcome Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

Nomenklatur Indikator Kinerja	RUMUS PERHITNGAN
<p>INDEKS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</p> <p><u>Definisi Operasional:</u></p> <p>Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan sistem proses yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan alat ukur komprehensif yang mengevaluasi kualitas dan kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Kota</p>	<p>Rumus: $(A*0.5)+(B*0.5)$</p> <p>A= Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan Penataan Ruang</p> <p>B= Persentase Pemenuhan RTH Publik Kota</p>
<p>INDEKS PENGATURAN, PEMBINAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG</p> <p><u>Definisi Operasional:</u></p> <p>Penyelenggaraan penataan ruang meliputi empat aspek yaitu Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang. Keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang diasumsikan tercapai jika keempat aspek penyelenggaraan penataan ruang tercapai dari variabel penyusun indikator yang merupakan target kinerja program yang dilaksanakan oleh dinas tata ruang (Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penataan Bangunan Gedung)</p>	<p>Rumus: $(A*0.3)+(B*0.3)+(C*0.3)+(D*0.1)$</p> <p>A= Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang</p> <p>B= Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang</p> <p>C= Persentase Penyelesaian Kasus Pemanfaatan Ruang</p> <p>D= Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan</p>
<p>Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang</p> <p><u>Definisi Operasional:</u></p> <p>Persentase yang dihitung dari jumlah persentase dari realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pengaturan dan pembinaan penataan ruang dibagi dengan total persentase target capaian output sub kegiatan yang mendukung pengaturan dan pembinaan penataan ruang kemudian dikalikan dengan target penilaian persentase. Target penilaian persentase tersebut berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86 Tahun 2017</p>	<p>Rumus: $(\Sigma A / \Sigma B) * C$</p> <p>A = Jumlah persentase realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pengaturan dan pembinaan penataan ruang</p> <p>B = total persentase target capaian outputsub kegiatan yang mendukung pengaturan dan pembinaan penataan ruang</p> <p>C = Target penilaian persentase berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86/2017 pada tahun n</p>

Nomenklatur Indikator Kinerja	RUMUS PERHITNGAN
<p>Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang</p> <p><u>Definisi Operasional:</u></p> <p>Persentase yang dihitung dari jumlah persentase dari realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang dibagi dengan total persentase target capaian output sub kegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang kemudian dikalikan dengan target penilaian persentase. Target penilaian persentase tersebut berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86 Tahun 2017</p>	<p><u>Rumus:</u> $(\Sigma A / \Sigma B) * C$</p> <p>A = Jumlah persentase realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang</p> <p>B = total persentase target capaian outputsub kegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang</p> <p>C = Target penilaian persentase berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86/2017 pada tahun n</p>
<p>Persentase Penyelesaian Kasus Pemanfaatan Ruang</p> <p><u>Definisi Operasional:</u></p> <p>Persentase yang dihitung dari kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang terselesaikan di Kota Bekasi dari realisasi kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, terutama realisasi Penertiban Bangunan Gedung pada Sub Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR</p>	<p><u>Rumus:</u> $(A/B) * 100\%$</p> <p>A = Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang terselesaikan dalam waktu 1 tahun</p> <p>B = Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun</p>
<p>Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan</p> <p><u>Definisi Operasional:</u></p> <p>Nilai persentase dari perbandingan antara Jumlah dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan dengan Jumlah target dokumen teknis penataan bangunan gedung</p>	<p><u>Rumus:</u> $(A/B) * 100\%$</p> <p>A = Jumlah dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan</p> <p>B = Jumlah permohonan dokumen teknis penataan bangunan gedung yang masuk</p>

Nomenklatur Indikator Kinerja	RUMUS PERHITNGAN
PERSENTASE PEMENUHAN RTH PUBLIK KOTA	<u>Rumus:</u> $(A/B) \times 100\%$ A =Luas RTH Publik di Wilayah Kota B = Luas Total Wilayah Kota
<u>Definisi Operasional:</u> Indikator yang mengukur seberapa besar luas ruang terbuka hijau publik yang telah disediakan di suatu wilayah kota dibandingkan dengan target minimum yang ditetapkan oleh PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap kota wajib menyediakan minimal 30% dari luas wilayahnya sebagai RTH, dengan 20% di antaranya harus berupa RTH publik	
Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan	<u>Rumus:</u> $(A/B) \times 100\%$ A =Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM B = Luas RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah Kota
<u>Definisi Operasional:</u> Indikator kuantitatif yang mengukur sejauh mana suatu wilayah atau kawasan perkotaan telah memenuhi ketentuan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik minimal 20% dari total luas wilayahnya, dengan pembagi adalah luas RTH publik yang tersedia di wilayah kota. Sehingga kondisi 100% dari indikator adalah RTH publik terpenuhi sesuai dengan ketentuan nasional (RTH Publik 20% dari luas wilayah Kota)	

Sumber: PP No. 21 Tahun 2021, Permendagri No. 86 tahun 2017, Imendagri No. 05 Tahun 2025

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana dijelaskan dalam dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029, pembangunan Kota Bekasi dirancang secara bertahap dalam lima tahun, dengan fokus tematik berbeda setiap tahunnya untuk memastikan kesinambungan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penahapan ini menjadi landasan bagi setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Tata Ruang, untuk menyelaraskan rencana strategis dan operasionalnya.



sumber: RPJMD Kota Bekasi 2025 - 2029

Gambar 3.1 Penahapan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026 - 2030

Seperti yang dijelaskan pada Tabel 3.2, berdasarkan penahapan pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026 - 2030, Dinas Tata Ruang memiliki peran strategis dalam mengawal penyediaan dan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang dimulai pada tahun 2026 hingga tercapainya peningkatan pemerataan infrastruktur berkualitas di tahun 2030. Setiap waktu tahap pembangunan mengandung tantangan dan arah kebijakan spesifik yang memerlukan dukungan langsung dari sektor penataan ruang.

Tabel 3.3 Penahapan Pembangunan yang Menjadi Fokus Dinas Tata Ruang

	TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Tahapan RPJMD Kota Bekasi	peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian	peningkatan infrastruktur pendukung kenyamanan kota	peningkatan pengembangan infrastruktur hijau	peningkatan pemerataan infrastruktur berkualitas

sumber: RPJMD Kota Bekasi 2025 - 2029

Berdasarkan fokus kontribusi tersebut, Dinas Tata Ruang menyusun penahapan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) secara tahunan yang mendukung tujuan pembangunan Kota Bekasi, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Penahapan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang 2026 -2030

	TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Tahapan Renstra Dinas Tata Ruang	Penyelarasan Pengaturan Tata Ruang Dan Bangunan Gedung serta Peningkatan Pembinaan Penataan Ruang	Peningkatan Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Optimalisasi Pelaksanaan Penataan Ruang dan Bangunan Gedung	Optimalisasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Pemerataan Akses dan Pemerataan Kualitas Pemanfaatan Ruang

3.2.1 STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Perumusan strategi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi untuk periode lima tahun ke depan dilakukan sebagai upaya menyusun tahapan perencanaan pembangunan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Strategi ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan visi "Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera".

Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Tata Ruang dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Evaluasi kinerja Renstra periode sebelumnya;
2. Analisis kondisi tata ruang saat ini serta isu strategis perkotaan;
3. Kesesuaian dengan penahapan pembangunan tahunan 2026 - 2030 Kota Bekasi;
4. Sinkronisasi dengan arah kebijakan provinsi (Jabar Istimewa) dan Nasional (Asta Cita).

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah pedoman strategis yang mengarahkan setiap Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan juga harus selaras dan sejalan dengan Visi dan Misi Kota Bekasi. Adapun Visi dan Misi Kota Bekasi dari RPJMD Tahun 2024-2029 yang menjadi tugas Dinas Tata Ruang yakni “ Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”, dengan misi Meningkatkan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan dokumen RPJMD, arah kebijakan Kota Bekasi yang dapat diwujudkan melalui Dinas Tata Ruang sesuai kewenangan urusan bidang penataan ruang meliputi :

1. Penerapan dan Penegakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
2. Perluasan Daya Dukung Lahan di tengah Arus Pengebangan

3. Penciptaan Lingkungan Perkotaan yang Asri, Nyaman, dan Berestetika.

Program prioritas Pembangunan Kota Bekasi Pada Pilar Infrastruktur meliputi :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
2. Program Penataan Bangunan Gedung
 - Presentasi Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan

Renstra PD dirancang untuk mendukung visi “Kota Bekasi Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Ihsan” serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Jawa Barat (Jabar Istimewa), dan Asta Cita. Arah kebijakan ini berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan daya saing daerah, pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Sehingga arah kebijakan Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disajikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	Operasionalsiasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
	Penyelenggaran Penataan Ruang yang meliputi Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	1. Penciptaan lingkungan perkotaan yang asri,nyaman, dan berestetika	Tujuan 1 TERWUJUDNYA RUANG KOTA YANG AMAN, NYAMAN, DAN PRODUKTIF	
		Sasaran 1.1	MENINGKATNYA KETERPADUAN PEMANFAATAN RUANG	
		Strategi 1.1.1	PENYELARASAN PENGATURAN TATA RUANG DAN BANGUNAN GEDUNG	
		Arah Kebijakan 1.1.1.1	PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG (SPPR)	
		Arah Kebijakan 1.1.3.4	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN BANGUNAN GEDUNG	
		Arah Kebijakan 1.1.4.1	PENGEMBANGAN REGULASI DAN PEDOMAN PENERAPAN DAN PENGAWASAN KAJIDAH BANGUNAN GEDUNG HIJAU	
		Strategi 1.1.2	PENINGKATAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG	
		Arah Kebijakan 1.1.2.1	PENGEMBANGAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG	
		Arah Kebijakan 1.1.2.2	PEMUTAKHIRAN DATA DAN INFORMASI DIGITAL TERKAIT PENATAAN RUANG	
		Arah Kebijakan 1.1.2.3	PENINGKATAN KOORDINASI DAN SOSIALISASI TERKAIT PENATAAN RUANG	
		Strategi 1.1.3	PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG	
		Arah Kebijakan 1.1.3.1	PENILAIAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)	
		Arah Kebijakan 1.1.3.2	PENINGKATAN KOORDINASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM UNTUK PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG	
		Arah Kebijakan 1.1.3.4	IDENTIFIKASI DAN PENERTIBAN BANGUNAN LIAR/TIDAK BERIZIN	
		Arah Kebijakan 1.1.3.3	PENYIAPAN DASAR HUKUM PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG	
		Arah Kebijakan 1.1.3.5	PENANGANAN SENGKETA PENATAAN RUANG	
		Strategi 1.1.4	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG DAN BANGUNAN GEDUNG BERORIENTASI LINGKUNGAN	

NO	Operasionalsiasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
			Arah Kebijakan 1.1.1.2 PENYUSUNAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BEKASI	
			Arah Kebijakan 1.1.1.3 PEMUTAKHIRAN CITRA SATELIT RESOLUSI TINGGI	
			Arah Kebijakan 1.1.1.4 MONITORING DAN EVALUASI PERWUJUDAN RUANG TERBUKA HIJAU	
			Arah Kebijakan 1.1.1.5 PENYUSUNAN PANDUAN RANCANG KOTA (PRK) ATAU RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)	
			Arah Kebijakan 1.1.1.6 PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA SPASIAL SARANA DAN PRASARANA UTILITAS (PSU) KOTA	
			Arah Kebijakan 1.1.4.2 PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOORDINASI DENGAN PENGELOLA/ PEMILIK/ PELAKSANA/ PENGELOLA BANGUNAN GEDUNG UNTUK PENERAPAN BGH	
			Arah Kebijakan 1.1.4.3 PENINGKATAN PEMANTAUAN PENERAPAN Kaidah BANGUNAN GEDUNG HIJAU	
			Arah Kebijakan 1.1.4.3 OPTIMALISASI KINERJA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)	
			Strategi 1.1.5 OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK	
			Arah Kebijakan 1.1.5.1 PENINGKATAN SDM APARATUR DENGAN BIMBINGAN TEKNIS TEMATIK	
			Strategi 1.1.6 PERWUJUDAN KELEMBAGAAN YANG KONDUSIF DAN NYAMAN	
			Arah Kebijakan 1.1.6.1 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2025-2029, program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan komponen operasional yang dirancang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program adalah kumpulan kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, yang selaras dengan misi dan prioritas RPJMD. Dinas Tata Ruang memiliki tiga program, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
2. Program Penataan Bangunan Gedung;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota

Ketiga program tersebut sesuai dengan program perangkat daerah yang tertuang pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Dengan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penataan Bangunan Gedung yang merupakan dua dari Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi sebagai pendukung dari Tujuan nomor 1 Kota Bekasi “Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari” dan Sasaran nomor 1.1 Kota Bekasi “Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern”. Kemudian perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tata Ruang selama 5 tahun ke depan sesuai dengan nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 disajikan di dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Tata Ruang

NO	ASTA CITA	NSPK	SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	OUTPUT	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	PRIORTIAS NASIONAL 3 "MELANJUTKAN PEGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA YANG BERKUALITAS, MENDORONG KEWIRUSAHAAN, MENGEMBANGKAN INDUSTRI KREATIF SERTA MENGEMBANGKAN AGROMARITIM INDUSTRI DI SENTRA PRODUKSI MELALUI PERAN AKTIF KOPERASI" REFERENSI LANDASAN HUKUM: - UU 26 TAHUN 2007 TENTANG	PENGATURAN, PEMBINAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN (TURBINLAKWAS) PENATAAN RUANG	MENINGKATNYA ESTETIKA KOTA DISERTAI INFRASTRUKTUR MODERN	TERWUJUDNYA RUANG KOTA YANG AMAN, NYAMAN, DAN PRODUKTIF			INDEKS PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG			
					MENINGKATNYA KETERPADUAN PEMANFAATAN RUANG		INDEKS PENGATURAN, PEMBINAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG			
							PERSENTASE PEMENUHAN RTH PUBLIK KOTA			
					MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	LUASAN RTH PUBLIK SEBESAR 20% DARI LUAS WILAYAH KOTA/KAWASAN PERKOTAAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			

NO	ASTA CITA	NSPK	SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	OUTPUT	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	PENATAAN RUANG						PERSENTASE PENILAIAN PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG			
	- PP 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG									
	- PP 16 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG						Persentase Penyusunan Dokumen Bahan Kebijakan Rencana Tata Ruang	Tersusunnya Dokumen Bahan Kebijakan Rencana Tata Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
	- PERWAL KOTA BEKASI 123 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI						Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
							Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
							Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	Tersampainya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	

NO	ASTA CITA	NSPK	SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	OUTPUT	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
							Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
							Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Penyusunan Peta Dasar	
							Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
							PERSENTASE PENILAIAN PEMANFAATAN RUANG			

NO	ASTA CITA	NSPK	SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	OUTPUT	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
							Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
							Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
							PERSENTASE PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN PEMANFAATAN			

NO	ASTA CITA	NSPK	SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	OUTPUT	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
							RUANG			
							Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
							Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
							Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
							Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan (Dokumen)	Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	
							Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Penilaian Perwujudan RTR	

NO	ASTA CITA	NSPK	SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	OUTPUT	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
							Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang (Berita Acara)	Terselesaikan sengketa penataan ruang	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	
							Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)	Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	
						MENINGKATNYA KUALITAS BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE DOKUMEN TEKNIS PENATAAN BANGUNAN GEDUNG YANG DITERBITKAN		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
							Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Managemen Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Managemen Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kota	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
							Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	

NO	ASTA CITA	NSPK	SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	OUTPUT	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
						MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN PENUNJANG URUSAN (%)		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERNTAHAN DAERAH KOTA	
							Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NO	ASTA CITA	NSPK	SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	OUTPUT	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
							Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NO	ASTA CITA	NSPK	SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	OUTPUT	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						MENINGKATNYA KESELARASAN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH DENGAN PENGANGGARAN	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH DENGAN PENGANGGARAN			
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NO	ASTA CITA	NSPK	SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	OUTPUT	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
							NSPK	NSPK		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						MENINGKATNYA NILAI INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN) PERANGKAT DAERAH	INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN) PERANGKAT DAERAH			
							Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NO	ASTA CITA	NSPK	SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	OUTPUT	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
							NSPK	NSPK		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						MENINGKATNYA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL	PERSENTASE PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH (%)			
							Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Tersusunnya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
							Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	

NO	ASTA CITA	NSPK	SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	OUTPUT	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
							atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Kemudian Rencana penganggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tata Ruang 5 Tahun Kedepan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				27.176.159.876		26.521.609.400		26.899.260.179		27.302.920.698		27.697.225.144		28.055.990.047	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				27.176.159.876		23.831.784.400		24.070.102.244		24.310.803.26		24.553.911.29		24.799.450.412	
Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan (%)	89,1		22.350.569.814	89,5	23.116.784.400	89,7	23.205.102.244	89,9	23.340.803.266	90,1	23.383.911.299	90,3	23.384.450.412	
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.633.103.000		22.631.431.000		22.631.431.000		22.631.431.000		22.631.431.000		22.631.431.000	
Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1			1	22.631.431.000	1	22.631.431.000	1	22.631.431.000	1	22.631.431.000	1	22.631.431.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.294			4.536		4.536		4.536		4.536		4.536		
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				19.628.103.000		22.626.431.000		22.626.431.000		22.626.431.000		22.626.431.000		22.626.431.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.294	3280	19.628.103.000	4.536	22.626.431.000	4.536	22.626.431.000	4.536	22.626.431.000	4.536	22.626.431.000	4.536	22.626.431.000	
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				393.103.158		485.353.400		520.122.924		655.823.946		698.931.979		699.471.092	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1	485.353.400	1	520.122.924	1	655.823.946	1	698.931.979	1	699.471.092	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12		
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan				312.603.158		300.353.400		335.122.924		335.823.946		368.931.979		369.471.092	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Logistik Kantor															
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	312.603.158	4	300.353.400	4	335.122.924	4	335.823.946	4	368.931.979	4	369.471.092	
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				35.500.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	35.500.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan				20.000.000		25.000.000		25.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	60.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	
1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-		100.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.324.363.656				53.548.320		53.548.320		53.548.320		53.548.320	
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12			12	0	12	53.548.320	12	53.548.320	12	53.548.320	12	53.548.320	
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				2.324.363.656				53.548.320		53.548.320		53.548.320		53.548.320	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kantor															
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.324.363.656	12	0	12	53.548.320	12	53.548.320	12	53.548.320	12	53.548.320	
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran (%)	100		190.800.000	92,5	25.000.000	92,5	25.000.000	92,5	30.000.000	92,5	30.000.000	92,5	230.000.000	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				190.800.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		230.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0			1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	2	230.000.000	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4			4		4		4		4		4		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)														
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				180.800.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		200.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2	180.800.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	2	200.000.000	
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	30.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	SKPD (Laporan)														
Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah (Nilai)	78,5		-	79,5	90.000.000	80	140.000.000	80,5	190.000.000	81	240.000.000	81,5	240.000.000	
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						90.000.000		140.000.000		190.000.000		240.000.000		240.000.000	
Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0		-	10	90.000.000	20	140.000.000	20	190.000.000	20	240.000.000	20	240.000.000	
1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-		90.000.000		140.000.000		190.000.000		240.000.000		240.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	0	0	-	10	90.000.000	20	140.000.000	20	190.000.000	20	240.000.000	20	240.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pelatihan (Orang)														
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah (%)	100			91,6	600.000.000	91,6	700.000.000	91,6	750.000.000	91,6	900.000.000	91,6	945.000.000	
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Tersusunnya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10			22	200.000.000	22	300.000.000	22	300.000.000	22	300.000.000	22	300.000.000	
1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Mebel				51.404.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tersedianya Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan (Unit)	10	16	51.404.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.012.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	12	17.012.000	22	200.000.000	22	300.000.000	22	300.000.000	22	300.000.000	22	300.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						400.000.000		400.000.000		450.000.000		600.000.000		645.000.000	
Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30			30	400.000.000	30	400.000.000	30	450.000.000	30	600.000.000	30	645.000.000	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5			5		5		5		5		5		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30			30				30		30		30		30

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.308.400		50.000.000		50.000.000		100.000.000		150.000.000		195.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	19.308.400	30	50.000.000		50.000.000	30	100.000.000	30	150.000.000	30	195.000.000	
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				931.825.000		1.229.825.000		1.293.529.935		1.368.037.259		1.436.080.767		1.515.161.896	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan (%)	94,18	94,3		94,4	1.229.825.000	94,5	1.293.529.935	94,6	1.368.037.259	94,7	1.436.080.767	95	1.515.161.896	
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				931.825.000		1.229.825.000		1.293.529.935		1.368.037.259		1.436.080.767		1.515.161.896	
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Managemen Bangunan Gedung di	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan	0			2	1.229.825.000	2	1.293.529.935	2	1.368.037.259	2	1.436.080.767	2	1.515.161.896	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Wilayah Daerah Kota	Bangunan Gedung (Dokumen)														
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	2			2		2		2		2		2		
1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				100.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan	0	1	100.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Bangunan Gedung (Dokumen)														
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				831.825.000		929.825.000		993.529.935		1.068.037.259		1.136.080.767		1.215.161.896	
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),	2	2	831.825.000	2	929.825.000	2	993.529.935	2	1.068.037.259	2	1.136.080.767	2	1.215.161.896	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)														
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				3.265.240.000		1.460.000.000		1.535.628.000		1.624.080.173		1.707.233.078		1.741.377.739	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan (%)	44,87	45,5		46,15	1.460.000.000	46,79	1.535.628.000	47,03	1.624.080.173	48,08	1.707.233.078	48,72	1.741.377.739	
	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang (%)	77	78		78,2		78,4		78,6		78,8		79		
	Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang (%)	77	78		78,2		78,4		78,6		78,8		79		
	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran	0	83		83		83		83		83		83		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pemanfaatan Ruang (%)														
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				773.066.000		200.000.000		200.000.000		0		447.233.078		481.377.739	
Tersusunnya Dokumen Bahan Kebijakan Rencana Tata Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	0	0		0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	447.233.078	0	481.377.739	
	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		0		0		1		0		
	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		0		0		0		1		
	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1	1		0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1		2		2			0		0		0	
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				726.000.000		200.000.000		200.000.000		0		0		0	
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		726.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota				-		0		0		0		447.233.078		0	
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0			0	0	0	0	0	0	1	447.233.078	0	0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
substansi															
1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang				-		0		0		0		0		0	
Tersampainya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	0		0		0		0		0		0		0	
1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				-		0		0		0		0		481.377.739	
Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		0		0		0		0		1	481.377.739
1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				47.066.000		0		0		0		0		0	
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan	1		47.066.000		0		0		0		0		0	0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	ruang. (Laporan)														
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				158.000.000		150.000.000		150.000.000		514.080.173		150.000.000		150.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kota	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	0			1	150.000.000	1	150.000.000	1	514.080.173	1	150.000.000	1	150.000.000	
	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0			0		0		1		0		0		
	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	1			0		0		0		0		0		
1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar				-		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	0	0	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
tersedianya data SHP Peta Dasar															
1.03.12.2.02.0006 - Peningkatan Kompetensi SDM bidang penataan ruang				88.000.000		0			0		0		0		0
Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencanaan tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	0	8	88.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				-		0			0		364.080.173		0		0
Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	-	0	0	0	0	1	364.080.173	0	0	0	0	0
1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				70.000.000		0			0		0		0		0
Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	1	1	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1.377.521.500		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	0			1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	0			2		2		2		2		2		
	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	3			3		3		3		3		3		
	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	2			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				138.650.000		0			0		0		0		0
Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	2	2	138.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				104.334.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	0	11	104.334.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				700.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan	0	3	700.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	ruang (Dokumen)														
1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				434.537.500		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	
Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	3	3	434.537.500	3	175.000.000	3	175.000.000	3	175.000.000	3	175.000.000	3	175.000.000	
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				956.652.500		810.000.000		885.628.000		810.000.000		810.000.000		810.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kota	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	0			0	810.000.000	1	885.628.000	0	810.000.000	0	810.000.000	0	810.000.000	
	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	0			1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	(Berita Acara)														
	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	6			6		6		6		6		6		
	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	80			80		80		80		80		80		
	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	0			0		0		0		0		0		
	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan (Dokumen)	0			1		1		1		1		1		
	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita	0			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Acara)														
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				-		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	6	0	-	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	
1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR				950.126.600		401.400.000		401.400.000		401.400.000		401.400.000		401.400.000	
Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	80	80	950.126.600	80	401.400.000	80	401.400.000	80	401.400.000	80	401.400.000	80	401.400.000	
1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK				-		0		75.628.000		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	0	0	-	0	0	1	75.628.000	0	0	0	0	0	0	
1.03.12.2.04.0010 - Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan				-		284.000.000		284.000.000		284.000.000		284.000.000		284.000.000	
Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan (Dokumen)	0	0	-	1	284.000.000	1	284.000.000	1	284.000.000	1	284.000.000	1	284.000.000	
1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan RTR				-		0		0		0		0		0	
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.03.12.2.04.0013 - Penyelesaian Sengketa Penataan				6.525.900		24.600.000		24.600.000		24.600.000		24.600.000		24.600.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Ruang															
Terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang (Berita Acara)	0	1	6.525.900	1	24.600.000	1	24.600.000	1	24.600.000	1	24.600.000	1	24.600.000	
1.03.12.2.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				-		0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berikut adalah daftar sub kegiatan prioritas yang menjadi fokus utama Dinas Tata Ruang untuk periode 2025-2029:

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG	Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Dalam RTR	
2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	MENINGKATNYA KUALITAS BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE DOKUMEN TEKNIS PENATAAN BANGUNAN GEDUNG YANG DITERBITKAN	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	

Tabel 4.5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Sasaran Prioritas Gerakan KOBE

NO	GERAKAN KOBE	SASARAN PRIORTAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KOBE HIJAU	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang “Ramah Disabilitas” di pusat-pusat pelayanan publik, pemukiman, dan perbelanjaan di Kota Bekasi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
		Pembangunan berbasis tematik sesuai karakteristik wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penataan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	

4.2 TARGET KINERJA

4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tata Ruang, maka target IKU Renstra Dinas Tata Ruang seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Tata Ruang

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	INDEKS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Nilai	45,12	45,25	45,38	45,51	45,64	45,77	
1.1	INDEKS PENGATURAN, PEMBINAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG	Nilai	81,13	81,26	81,39	81,52	81,65	81,80	
1.2	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAHAN RTH PUBLIK KOTA	%	9,10%	9,23%	9,36%	9,49%	9,62%	9,74%	

4.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah parameter terukur yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKK Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2025-2030 sesuai dengan IKK pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disajikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Tata Ruang

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PERSENTASE DOKUMEN TEKNIS PENATAAN BANGUNAN GEDUNG YANG DITERBITKAN	%	94,3	94,4	94,5	94,6	94,7	95	
2	PERSENTASE TERSEDIANYA LUASAN RTH PUBLIK SEBESAR 20% DARI LUAS WILAYAH ATAU KAWASAN PERKOTAAN	%	45,50	46,15	46,79	47,43	48,08	48,72	
3	PERSENTASE PENILAIAN PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG	%	78	78,2	78,4	78,6	78,8	79	
4	PERSENTASE PENILAIAN PEMANFAATAN RUANG	%	78	78,2	78,4	78,6	78,8	79	
5	PERSENTASE PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG	%	83	83	83	83	83	83	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan pedoman strategis untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penataan ruang yang mendukung peningkatan daya saing daerah, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 dan RTRW Kota Bekasi 2024-2044. Dokumen ini telah merumuskan tujuan, sasaran, strategi, serta program prioritas yang terukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Dinas Tata Ruang siap melaksanakan tugasnya secara efektif dan akuntabel. Pengendalian dan evaluasi akan dilakukan secara berkala melalui laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) dan koordinasi lintas sektoral untuk memastikan harmonisasi dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan program Jabar Istimewa. Melalui komitmen terhadap tata kelola yang berintegritas dan partisipasi masyarakat, Renstra inidiharapkan dapat mewujudkan Kota Bekasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Bekasi, 19 September 2025

Kepala Dinas Tata Ruang



Dzikron, S.T., M.T.

Pembina Tingkat 1

NIP. 19730802 200212 1 006